

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1 Privatisasi yang Merugikan Masyarakat dan Negara:**

Privatisasi air di Jakarta, yang dimulai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara PAM Jaya dengan PT Aetra Air Jakarta (PT Aetra) dan PT PAM Lyonnaise Jaya (PT Palyja) pada tahun 1997, telah mengakibatkan berbagai kerugian, baik bagi masyarakat maupun negara. Laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan DKI Jakarta menyebutkan bahwa kerugian yang dialami oleh PAM Jaya sejak privatisasi ini mencapai Rp1,4 triliun hingga Desember 2015. Kontrak yang dinilai lebih menguntungkan pihak swasta dibandingkan negara ini juga menyebabkan beban keuangan yang besar bagi pemerintah (Bakker, 2006).

Kegagalan dalam Pelayanan dan Akses Air Bersih PT Aetra dan PT Palyja gagal memenuhi target-target yang telah ditetapkan dalam kontrak, seperti cakupan pelayanan, tingkat kebocoran air, dan kualitas air bersih yang disediakan. Banyak warga, terutama di daerah-daerah tertentu seperti Muara Baru dan Marunda Kepu, menghadapi kesulitan mendapatkan akses air bersih, dengan air yang sering kali tidak dialirkan atau kualitasnya yang buruk. Hal ini membebani masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, karena mereka harus membeli air dengan harga yang tinggi (Rismansyah et al, 2020).

Perlawanan Masyarakat terhadap privatisasi air memicu gerakan penolakan yang kuat dari masyarakat, yang akhirnya tergabung dalam KMMSAJ. Gerakan ini berfokus pada pengembalian pengelolaan air kepada pemerintah (remunipalisasi), dengan alasan bahwa privatisasi telah mengabaikan hak asasi masyarakat untuk mendapatkan akses air bersih yang terjangkau (Dinansyah & Irwansyah, 2023). Koalisi ini berhasil mengajukan gugatan yang

dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2015, yang menunjukkan keberhasilan langkah hukum dalam melawan privatisasi.

## 5.2 Pentingnya Remunipalisasi dan Partisipasi Publik

KMMSAJ dan organisasi terkait menekankan pentingnya remunerasi, yaitu pengembalian pengelolaan air dari swasta ke publik, sebagai langkah untuk memastikan akses air bersih yang adil dan merata. Pendidikan, advokasi, dan kampanye publik dilakukan secara luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak mereka atas air dan pentingnya partisipasi publik dalam mengawasi kebijakan pengelolaan sumber daya vital ini (Dinansyah & Irwansyah, 2023). Pada dasarnya partisipasi masyarakat merupakan modal sosial yang utama untuk mencapai keberlanjutan program. Oleh karena itu, pengelola badan pengelola air bersih harus berbasis masyarakat (Fawzia et al, 2018).

Dampak privatisasi air tidak hanya terbatas pada aspek sosial, seperti marginalisasi komunitas berpenghasilan rendah, tetapi juga pada aspek ekologis. Pengelolaan air yang buruk dan ekstraksi air tanah yang berlebihan oleh sektor bisnis memperburuk kondisi lingkungan, yang juga berkontribusi pada permasalahan seperti penurunan tanah di Jakarta. Privatisasi air di Jakarta, meskipun awalnya diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan, ternyata lebih banyak membawa dampak negatif, terutama bagi masyarakat miskin dan negara. Gerakan masyarakat sipil melalui KMMSAJ berhasil menunjukkan bahwa pengelolaan air bersih seharusnya berada di bawah kontrol publik untuk memastikan keadilan sosial dan ekologis, serta untuk melindungi hak asasi masyarakat atas air